

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Peran inklusi keuangan diperdebatkan dengan baik dalam literatur pengembangan sistem keuangan yang menyeluruh mengharuskan kebutuhan pengguna yang berbeda diperhatikan untuk memastikan produk keuangan dihargai oleh semua orang. Penentuan pendorong inklusi keuangan meningkatkan penyerapan produk keuangan. Inklusi keuangan di berbagai negara bervariasi dan alasan variasi tersebut bisa bersifat mikro atau makro (Sanderson et al. 2018).

Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan memastikan bahwa individu dan organisasi memiliki akses ke barang dan jasa keuangan yang berharga dan dapat diakses, seperti pembelian, transfer, deposito, kredit dan asuransi, yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Langkah pertama menuju inklusi keuangan yang lebih besar adalah akses ke akun trading. Rekening transaksi juga merupakan pintu gerbang ke lembaga perbankan lain dan akan menjamin layanan keuangan terbuka untuk individu di seluruh dunia. Bank Indonesia juga mencatat bahwa strategi inklusi keuangan terutama merupakan metode pendalaman sumber daya keuangan yang ditargetkan pada masyarakat untuk memanfaatkan barang dan jasa keuangan terstruktur seperti penyimpanan uang yang aman, transfer, simpan pinjam dan asuransi. (Vigory & Fauziyah, 2021).

Beberapa studi yang ada setidaknya mengaitkan tiga poin inklusi keuangan, seperti akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan. Berdasarkan ketiga elemen tersebut, penelitian ini mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan akses masyarakat miskin ke berbagai layanan sistem. Lebih lanjut, ditemukan bahwa itu menghubungkan orang, terutama yang miskin dan rentan, ke sistem perbankan formal dengan akses yang aman, mudah, dan terjangkau ke kredit dan layanan keuangan lainnya (Angga et al 2021).

Inklusi keuangan dapat meningkatkan output nasional jika melibatkan sebagian besar penduduk. Inklusi keuangan berpotensi meningkatkan kesejahteraan individu dan rumah tangga, memacu kegiatan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial dan prioritas pembangunan (Sanderson et al. 2018).

Saat ini kita tidak dapat membayangkan proses pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan perkembangan perbankan. Dengan perkembangan yang terus-menerus ini bank mengejar keuntungan yang dioptimalkan. Dalam sistem perbankan konvensional, manajemen harus membebankan lebih banyak suku bunga ke simpanan untuk menarik dan meningkatkan sumber daya perbankan. Sementara kenaikan ini dikompensasi oleh pinjaman yang dipinjamkan sehingga lebih banyak suku bunga. Dengan cara ini kita dapat mengakui bahwa sistem perbankan di atas tidak melayani investasi riil dan sektor ekonomi yang sebenarnya (Faramarz et al, 2014).

Sektor perbankan memiliki fungsi intermediasi untuk menyalurkan modal atau simpanan kepada pelaku usaha sehingga berperan penting dalam menggerakkan sektor riil. Fungsi intermediasi berperan dalam mempercepat arus investasi yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin mudah akses setiap lapisan masyarakat terhadap layanan perbankan, maka akan semakin optimal pelaksanaan fungsi intermediasi bank. Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro dan kecil telah menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam strategi inklusi keuangan nasional yang dirancang sejak 2010 (Faramarz et al, 2014).

Di sisi lain, kriteria sistem perbankan syariah mengungkapkan bahwa pinjaman melalui kontrak *supernumerary* (antara bank dan nasabah) membantu investasi riil. Karena kriteria ini menekankan pada kontrak tidak menghasilkan hutang tetapi mereka menghasilkan upah bagi bank syariah. Selain itu, dapat dilihat dalam pola praktis bahwa bagaimana stimulus seperti peningkatan efisiensi

atau pengurangan risiko kerugian likuiditas dan akhirnya penurunan risiko kebangkrutan mendorong orang untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Sebagai hasil dari persuasi perubahan stimulus investasi riil dan alokasi sumber daya perbankan yang dioptimalkan ini menghasilkan bentuk baru dari fungsi utilitas dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Faramarz et al, 2014).

Di sisi lain, Muslim yang merupakan sekitar seperempat dari populasi dunia, secara sukarela membiarkan diri mereka dikecualikan secara finansial. Alasannya adalah karena sistem keuangan saat ini bertentangan dengan sistem aturan agama Islam yang disebut Syariah. Namun, beberapa dekade terakhir, berkat munculnya produk dan asuransi keuangan pengaduan syariah, yang memungkinkan pengecualian keuangan sesuai dengan interpretasi syariah yang fleksibel, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan syariah. negara, ada banyak kekhawatiran yang berkembang (Jung-Suk et al, 2017).

Saat ini banyak negara yang mengembangkan perbankan syariah, terutama yang telah tergabung dalam Islamic Cooperation Organization (OIC). Hasil dari Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life menunjukkan bahwa populasi negara-negara anggota OKI pada tahun 2018 sekitar 1,8 miliar (28,4% dari total populasi dunia) dengan ukuran ekonomi sebesar 21% dari total PDB dunia. Hal ini merupakan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah formal untuk menjalankan fungsi intermediasinya. Namun, menjadi tantangan dalam menerapkan keuangan inklusif karena dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Angga et al 2021).

Negara-negara Muslim di bawah naungan OKI menggalakkan keuangan inklusif berbasis syariah agar sesuai dengan mayoritas yang menganut syariat Islam. Kemajuan ini diwujudkan dengan minat investor terhadap produk keuangan syariah sebagai sarana investasi alternatif, dengan karakteristik spekulatif yang rendah dibandingkan dengan jasa keuangan barat. Hal ini tentu mendorong potensi permintaan jasa keuangan yang juga meningkat seiring dengan keragaman produk di negara-negara OKI (Angga et al 2021).

Berdasarkan konteks negara-negara anggota OKI, inklusi keuangan merupakan strategi nasional masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan melalui transformasi sistem Islam yang mudah diakses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, juga bertujuan untuk memperhatikan masyarakat miskin berpenghasilan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (Angga et al 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu gagasan terpenting di dunia ekonomi. Terlepas dari kritik bahwa tingkat dan laju pertumbuhan tidak selalu mencerminkan tingkat nyata dari standar hidup penduduk, itu tetap menjadi ukuran utama kemakmuran. Namun, sebagai ukuran yang menggambarkan dinamika proses ekonomi di negara itu, ia memiliki beberapa kelemahan. Pertama, tidak mencatat volume produksi yang diperoleh dari pasar informal yang dikenal dengan pasar gelap, artinya tidak semua transaksi ekonomi termasuk dalam total volume output yang dihasilkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak memperhitungkan perubahan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja, yang jelas mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Juga ukuran pertumbuhan ekonomi tidak termasuk proses negatif yang terkait dengan kegiatan ekonomi, seperti pencemaran lingkungan, degradasi progresif, atau polusi suara. Namun, terlepas dari semua kelemahan ini, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi ukuran utama kondisi sosial ekonomi warga suatu negara (Marko et al, 2019).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga

yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki sistem perbankan ganda. Dalam sistem ini, Indonesia menggunakan perbankan konvensional dan syariah sistem. Perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat walaupun belum sebanding dengan bank konvensional. Bank Islam pertama yang didirikan adalah Bank Muamalat pada tahun 1991 (Vigory & Fauziah, 2021).

Pada tahun 2017, 48,9 persen orang dewasa di Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dari hasil tersebut, 37% orang miskin sudah memiliki akses ke lembaga keuangan formal, dan 57% orang kaya sudah memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, aktivitas pembayaran digital meningkat, termasuk melakukan atau menerima pembayaran secara online. Aktivitas pembayaran digital meningkat menjadi 72% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2014 sebesar 62%. Data tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian sangat besar. Dengan pertumbuhan yang begitu besar, semakin banyak orang yang akan dilayani. Semakin luas jangkauan perbankan syariah menunjukkan bahwa peran perbankan syariah semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi (Vigory & Fauziah, 2021).

Menurut Vigory & Fauziah (2021) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah akan disalurkan melalui pembiayaan yang dapat mendorong pembangunan di sektor riil. Sedangkan Pembiayaan pada perbankan pada lag 1 berpengaruh positif dan lag 2 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Besaran pembiayaan erat kaitannya dengan sektor riil, sehingga berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari

hasil estimasi FEVD ditemukan bahwa variabel yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Dana Pihak Ketiga.

Menurut Ayoub (2022) Malaysia memiliki banyak keberhasilan dalam mengembangkan industri keuangan syariahnya. Meskipun hanya memiliki sekitar 2% dari populasi Muslim dunia, Malaysia menyumbang lebih dari 20% aset keuangan Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, keuangan Islam mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk perbankan konsumen dan korporasi, dana investasi, asuransi, operasi pasar modal, dan perusahaan FinTech yang sedang berkembang. Pengalaman Malaysia dengan perbankan Islam juga menggambarkan bagaimana sistem keuangan Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem konvensional.

Perbankan syariah menyumbang pertumbuhan minimal 11 persen dalam pembangunan ekonomi Malaysia dan secara tidak langsung berkontribusi pada agenda global untuk mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perbankan dan keuangan syariah telah muncul sebagai salah satu komponen pasar yang kompetitif dan komprehensif yang signifikan, di mana dapat diandalkan dengan perkembangan keuangan konvensional dalam hal kontribusi ekonomi (Ahmad et al, 2017).

Pertumbuhan stabil bank-bank Islam telah menjadi ciri khas lanskap keuangan dunia Muslim di zaman sekarang. Malaysia telah membuktikan bahwa keuangan syariah tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan, tetapi pada saat yang sama mendorong sejumlah sektor ekonomi untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan. Hal ini dapat diamati ketika keuangan syariah sangat menguntungkan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan penggabungan UKM dan lainnya lembaga kredit mikro, hal ini menyebabkan peningkatan diversifikasi sistem keuangan, yang kemudian meningkatkan fleksibilitas dan stabilitasnya. Selain itu, kemungkinan untuk memperluas hubungan internasional juga terwujud.

Meskipun dengan ekonomi global yang melambat dan pengepungan perbankan konvensional di negara-negara barat, keuangan Islam terus berkembang dengan pertumbuhan yang kuat (Ahmad et al, 2017).

Keterbukaan perdagangan, pembangunan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi biasanya diperiksa dalam literatur empiris dalam dua pendekatan yang berbeda: Yang pertama mencoba untuk menyelidiki dampak keterbukaan perdagangan atau pembangunan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara individual. Di sisi lain, pendekatan kedua mengkaji hubungan antara liberalisasi perdagangan dan pembangunan keuangan secara bersama-sama. Sehubungan dengan metode yang digunakan untuk menilai dampak pembangunan keuangan dan (atau) keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, ada dua metode ekonometrika utama. Teknik pertama menggunakan regresi sederhana atau berganda, sedangkan metode kedua menggunakan masalah kausalitas dalam model bivariat. Namun, sebagian besar penelitian terbaru cenderung berfokus pada model VAR dan VEC dan pendekatan kointegrasi (Hatem & Khaled 2015).

Sektor Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi Sistem perbankan yang sesuai dengan Syariah Islam (kerangka kerja hukum Islam) berada di bawah definisi perbankan Islam. Selama beberapa dekade terakhir, pasar keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa di seluruh dunia. Ini telah membuktikan keuangan islam sebagai alternatif yang layak dan layak untuk sistem perbankan konvensional dan memberikan kontribusi bagian yang lebih besar ke pasar secara keseluruhan. Berbeda dengan bank berbasis bunga, bank syariah bekerja sebagai perantara keuangan dan agen perdagangan pada saat yang sama. Selain itu, berdasarkan produksi dan intermediasi perbankan pendekatan bank syariah ditemukan efisien secara ekonomi, dibandingkan dengan rekan-rekan tradisional mereka. Oleh karena itu, bank syariah reaktif dalam mempromosikan kegiatan ekonomi riil dengan berpartisipasi dengan klien mereka sebagai mitra dagang yang penting untuk pertumbuhan ekonomi (Judil et al, 2021).

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang paling penting dan paling ditakuti oleh para pelaku ekonomi, termasuk Pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk terhadap struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Dan dampak yang lebih luas seperti ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi, penurunan daya saing, suku bunga, distribusi pendapatan yang tidak merata dan pengangguran meningkat. Beberapa negara yang mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yolanda, 2017).

Menurut Vigory dan Fauziyah (2021) inflasi pada lag 1 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan lag 2 berpengaruh positif. Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ketika inflasi yang ada dapat merangsang produsen untuk meningkatkan produksi karena kenaikan harga. Sedangkan inflasi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ketika kenaikan harga hanya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Malaysia dikenal sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas seperti Amerika, Cina, Singapura dan Thailand. Jika dibandingkan, Malaysia bisa dikatakan memiliki inflasi yang rendah. Perbandingan tingkat inflasi regional antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dibandingkan dengan Singapura dan Thailand, Malaysia telah menghadapi inflasi yang rendah selama beberapa periode waktu. Secara keseluruhan, selama tahun 1980 hingga 2014, Amerika dan China menghadapi inflasi yang hampir tinggi sepanjang tahun ini. Selain ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong oleh ketersediaan sumber daya manusia (Manickam et al, 2017).

Laporan Daya Saing Perbankan Syariah Dunia (2012-2013) menyatakan bahwa Malaysia telah muncul sebagai salah satu dari enam pasar yang sangat penting bagi IBF bersama dengan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Indonesia, Turki dan Uni Emirat Arab. Selain itu, seperti dilansir majalah The Economist, lebih

dari seperlima sistem perbankan Malaysia sudah sesuai dengan Syariah dan kemampuan untuk menangkap bagian yang lebih besar dari pasar Sukuk atau obligasi syariah global pada tahun 2014. Ada banyak faktor berkontribusi pada pencapaian yang luar biasa seperti populasi di mana di Malaysia, lebih dari 60% populasi adalah Muslim, peran pemerintah dalam mempromosikan IBF, kolaborasi antar bank, pedoman standar dalam hal aturan dan peraturan yang berkaitan dengan Syariah dan banyak faktor lainnya (Ahmad et al, 2017).

Nilai tukar dan pergerakannya yang konstan sangat penting bagi masyarakat umum karena satu atau lain cara fluktuasinya berpengaruh pada kompetensi ekonomi untuk mencapai kapasitas produktif yang optimal. Hal ini mengkhawatirkan mengingat kepentingan makro ekonomi khususnya di negara dengan ketergantungan impor yang tinggi. Nilai tukar mencerminkan rasio di mana satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain, yaitu rasio harga mata uang. Nilai tukar merupakan nilai mata uang negara asing dalam hal mata uang negara asal dan juga menentukan berapa nilai satu mata uang dalam hal yang lain. Nilai tukar yang benar atau sesuai telah menjadi salah satu faktor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara maju, sedangkan fluktuasi reguler atau nilai tukar yang tidak sesuai telah menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi banyak negara (Saidi dkk, 2017)

Nilai tukar juga merupakan harga aset mata uang asing yang dapat mempengaruhi kekayaan. Depresiasi nilai tukar mata uang domestik dapat meningkatkan kekayaan rumah tangga yang memegang mata uang asing. Peningkatan kekayaan pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi, PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya berdasarkan jalur perdagangannya, nilai tukar merupakan alat bantu dalam transaksi perdagangan internasional. Depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan harga barang-barang domestik lebih kompetitif di pasar internasional, kemudian dapat menyebabkan peningkatan pembelian barang-barang domestik oleh negara lain, sehingga dapat menyebabkan peningkatan ekspor agregat. Peningkatan ini dapat meningkatkan neraca perdagangan, PDB dan pertumbuhan ekonomi (Okorontah, 2020).

Menurut Zukarnain (2013) tingkat aktivitas ekonomi negara pengimpor dan nilai tukar riil merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi ekspor Malaysia. Sebagai negara dengan pasar domestik yang relatif kecil, pertumbuhan ekonomi Malaysia sangat bergantung pada perdagangan internasional yang didorong oleh ekspor, kekhawatiran utama Malaysia adalah bahwa ekonomi yang sangat terbuka dapat membuat sektor ekspornya rentan terhadap guncangan eksternal, terutama yang berkaitan dengan volatilitas nilai tukar.

Menurut Ema, dkk (2022) indikator nilai tukar dan impor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel ekspor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, perbaikan ekonomi berupaya untuk menghilangkan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial, sehingga terwujud masyarakat yang makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, untuk mencapai kemakmuran tersebut harus difokuskan pada pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan kemajuan, dan kehidupan bernegara yang kuat dan aktif.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara variabel inklusi keuangan syariah dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan judul Analisis Variabel Inklusi Keuangan Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan Malaysia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh variabel inklusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia ?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

1. Mengetahui pengaruh variabel inklusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia,

2. Mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia dan malaysia.

